SKRIPSI

UPAYA HEGEMONI TIONGKOK MELALUI EKSPANSI BRICS+ DI IRAN TAHUN 2021-2024

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Disusun Oleh :

STEFANI ELIKA ADIEL

NIM. E.1112221027

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

UPAYA HEGEMONI TIONGKOK MELALUI EKSPANSI BRICS+ DI IRAN TAHUN 2021-2024

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Stefani Elika Adiel

E1112221027

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

UPAYA HEGEMONI TIONGKOK MELALUI EKSPANSI BRICS+

DI IRAN TAHUN 2021-2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Stefani Elika Adiel

NIM. E1112221027

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Laras Putri Olifiani, S.IP, M.H.I
NIP 199204232019032013

Tanggal: 21 Mei 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Posmanto Marbun, S.IP., M.A
NIP 198701072023211017

Tanggal: 02 Juni 2026

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA HEGEMONI TIONGKOK MELALUI EKSPANSI BRICS+ DI IRAN TAHUN 2021-2024

Oleh:

Stefani Elika Adiel

NIM. E1112221027

Dipertahankan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juli 2026

Waktu : 15.00

Tempat : Ruang Sidang 4

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Laras Putri Olifiani, S.IP, M.H.I	Posmanto Marbun, S.IP., M.A.
NIP 199204232019032013	NIP 198701072023211017
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Ori Fahriansyah, S.IP.,M.Si	Adibrata iriansyah, S.IP.,M.A.
NIP 196911222002121002	NIP 199212172020121008

Disahkan oleh
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan upaya hegemoni Tiongkok melalui ekspansi BRICS+ di Iran dari 2021 hingga 2024. Fokus penelitian adalah bagaimana Tiongkok memanfaatkan ekspansi BRICS+ sebagai instrumen strategis untuk membangun dominasi ekonomi dan diplomatik atas Iran, yang telah terisolasi oleh sanksi internasional yang berkepanjangan, terutama setelah AS meninggalkan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada 2018. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi dokumen resmi, laporan lembaga internasional, jurnal akademik, dan sumber daring yang dapat diandalkan. Empat elemen yaitu *security, production, financial,* dan *knowledge element,* digunakan untuk melakukan analisis berdasarkan teori *structural power* Susan Strange (1987). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tiongkok secara sistematis menggunakan keempat elemen ini untuk membangun hegemoni di Iran. Pada *security element*, Tiongkok memenuhi keterbatasan proyeksi militernya dengan perjanjian kemitraan strategis dan mediasi regional. Tiongkok mengisi kekosongan diplomatik Iran melalui perjanjian kemitraan strategis dan mediasi regional sebagai pengganti keterbatasan proyeksi militernya. Pada *production element*, investasi $400 miliar melalui *Comprehensive Strategic Partnership Agreement* dan BRI menciptakan ketergantungan struktural Iran di sektor energi dan infrastruktur. Pada *financial element,* Tiongkok menjadi satu-satunya penyedia sistem keuangan alternatif bagi Iran melalui NDB dan penggunaan Yuan dalam transaksi energi. Pada *knowledge element,* monopoli infrastruktur 5G Huawei dan transfer teknologi energi menjadikan Iran bergantung penuh pada ekosistem teknologi Tiongkok. Secara keseluruhan, posisi Tiongkok lebih tepat disebut sebagai *aspiring* hegemon yang sedang membangun dominasi bertahap, bukan hegemon penuh. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas penerapan teori *structural power* Strange melalui kajian komparatif terhadap negara-negara anggota BRICS+ lainnya, serta mendorong kajian lebih lanjut mengenai potensi ketergantungan struktural dari keanggotaan dalam institusi multilateral yang didominasi oleh satu kekuatan besar.

Kata Kunci : BRICS+, Hegemoni, Iran, *Structural power,* Tiongkok

ABSTRACT

This study examines China's hegemonic efforts through BRICS+ expansion in Iran from 2021 to 2024. The study focuses on how China utilizes BRICS+ expansion as a strategic instrument to establish economic and diplomatic dominance over Iran, which has been isolated by prolonged international sanctions, particularly following the United States' withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2018. A descriptive qualitative method was employed in this study. The secondary data collected included official documents, reports from international institutions, academic journals, and reliable online sources. Four elements, such as the security, production, financial, and knowledge elements, were used to conduct the analysis based on Susan Strange's (1987) theory of structural power. The results show that China systematically utilizes these four elements to establish hegemony in Iran. In the security element, China addresses the limitations of its military projection through strategic partnership agreements and regional mediation. China fills Iran's diplomatic vacuum through strategic partnership agreements and regional mediation as an alternative to its limited military projection capabilities. In the production element, the $400 billion investment through the Comprehensive Strategic Partnership Agreement and the Belt and Road Initiative (BRI) creates Iran's structural dependence in the energy and infrastructure sectors. In the financial element, China has become the sole provider of an alternative financial system for Iran through the New Development Bank (NDB) and the use of the yuan in energy transactions. In the knowledge element, Huawei's 5G infrastructure dominance and energy technology transfers have made Iran highly dependent on China's technological ecosystem. Overall, China's position is more appropriately described as that of an aspiring hegemon that is gradually building its dominance rather than a fully established hegemon. Future research is expected to expand the application of Strange's structural power theory through comparative studies of other BRICS+ member states, as well as to encourage further research into the potential for structural dependence resulting from membership in multilateral institutions dominated by a single major power.

Keywords: BRICS+, Hegemony, Iran, Structural Power, China

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Upaya Hegemoni Tiongkok Melalui Ekspansi BRICS+ di Iran Tahun 2021-2024". Judul ini dipilih karena berfokus pada perubahan kekuasaan di dunia dan bagaimana Tiongkok menggunakan ekspansi BRICS+ untuk meningkatkan pengaruhnya di Iran, sebuah negara strategis dengan banyak potensi sumber daya dan posisi geopolitik yang signifikan. Periode penelitian pada skripsi ini adalah 2021-2024, karena menandai penandatanganan perjanjian strategis penting antara Tiongkok dan Iran, serta keanggotaan resmi Iran dalam BRICS+, yang merupakan peristiwa penting dalam membangun hegemoni Tiongkok.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya hegemoni Tiongkok melalui ekspansi BRICS+ di Iran tahun 2021-2024? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya hegemoni Tiongkok secara menyeluruh dan mendalam untuk membangun hegemoninya di Iran melalui BRICS+ pada tahun 2021-2024. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah *structural power* oleh Susan Strange.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup dokumen resmi, laporan lembaga internasional seperti Council on Foreign Relations, Atlantic Council, dan Carnegie Endowment for International Peace, dan publikasi *think tank* seperti Konrad-Adenauer-Stiftung dan European Parliament. Empat elemen dalam yaitu s*ecurity element, production element, financial element,* dan *knowledge element* adalah kerangka teori kekuatan struktur

Susan Strange (1987) yang digunakan untuk melakukan analisis data. Keabsahan data penelitian dijamin dengan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tiongkok secara sistematis menggunakan keempat kekuatan struktural dalam upaya hegemoni di Iran. Pada *security element*, Tiongkok memanfaatkan isolasi diplomatik Iran sebagai ruang strategis dengan memposisikan diri sebagai pelindung *de facto* melalui perjanjian kemitraan strategis yang mencakup klausul pertahanan, keberhasilan mediasi rekonsiliasi Arab Saudi-Iran di Beijing pada tahun 2023, dan legitimasi multilateral melalui BRICS+. Pada *production element*, Tiongkok membangun ketergantungan struktural terhadap Iran melalui dominasi ekspor minyak Iran dari 90 hingga 91 persen, komitmen investasi infrastruktur senilai $400 miliar, dan *inisiatif Belt and Road* (BRI) untuk mengintegrasikan Iran ke dalam rantai produksi regional. Dalam *financial element*, Tiongkok menjadi satu-satunya sumber akses bagi keuangan Iran di tengah pemblokiran SWIFT. Ini dilakukan melalui pembiayaan alternatif *New Development Bank* (NDB), penggunaan Yuan dalam transaksi energi melalui sistem CIPS, dan struktur legitimasi multilateral BRICS+. Dalam *knowledge element*, Tiongkok menguasai infrastruktur digital Iran dengan teknologi Huawei 5G, menyebarkan teknologi ke sektor energi, mempromosikan gagasan ideologis BRICS+ sebagai institusi yang lebih adil di tingkat global, dan menerapkan standar teknologi BRI di seluruh infrastruktur yang telah dibangun.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa, oleh karena *power projection* militer yang masih terbatas dan resistensi domestik Iran terhadap ketergantungan tunggal, Tiongkok belum sepenuhnya menjadi hegemon di Iran.

Sebaliknya, posisi Tiongkok lebih tepat disebut sebagai *aspiring hegemon,* yaitu aktor yang sedang membangun dan memperluas pengaruh hegemoniknya di Iran. Sehingga dalam konteks penelitian ini, 2021 hingga 2024 yang merupakan fase penting dari proses konsolidasi hegemoni Tiongkok.

Adapun saran yang diberikan berdasarkan penelitian skripsi ini yaitu diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas penerapan teori *structural power* Strange melalui kajian komparatif terhadap negara-negara anggota BRICS+, serta mendorong kajian lebih lanjut mengenai potensi ketergantungan struktural yang dapat muncul dari keanggotaan dalam institusi multilateral yang didominasi oleh satu kekuatan besar.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Stefani Elika Adiel
Nomor Mahasiswa	: E1112221027
Program Studi	: Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini: (1) merupakan hasil karya saya sendiri; (2) tidak mengandung unsur plagiasi serta telah mempertimbangkan penggunaan *artificial intelligence*(AI) yang bertanggung jawab; (3) belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi; (4) dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juni 2026

Yang membuat pernyataan



(Stefani Elika Adiel)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"*You don't need a perfect plan, you just need a first step" -**Anonymous***

*"Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about it self. Each day has enough trouble of its own" -**Matthew 6:34***

Persembahan

1. Untuk diri sendiri, karena sudah bertahan sejauh ini, dalam hari-hari yang mungkin dilalui dengan keluhan, namun tidak berhenti dan terus berusaha untuk tetap menyelesaikan segala proses yang ada hingga selesai. *Proud of you!*
2. Untuk orangtua terkasih, alm papa dan almh mama buat dukungan dan doa yang saya yakini senantiasa menyertai saya. Serta teruntuk saudara-saudari tersayang, Ce Venna, Ce Leo, Ko Ardi, dan Ce Maya yang senantiasa mendukung dan mendoakan. *Love you all!*
3. Untuk Jeje, Michelle, Kak Glo, Ema, Nisa, Riya, dan Shofi. Nama-nama yang membersamai dari awal perkuliahan sampai saat ini, dan semoga kebersamaan ini tidak berakhir disini namun terus berlanjut. Untuk setiap *support* serta momen-momen tak terlupakan yang telah kita alami bersama. *We made it!!*
4. Untuk Regita, yang telah membersamai *journey* perkuliahan di kota dan kampus ini, sampai di saat kita akan lulus bersama sekarang. *We did it!!! Let's chase another journey together!*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Upaya Hegemoni Tiongkok ke Iran Melalui Ekspansi BRICS+ 2021-2024". Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti menyadari penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektorat Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Drs. Abdul Rahim, M.Si, selaku Ketua Pengelola PPAPK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
5. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si. selaku Penguji I sekaligus Koordinator Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga kepada peneliti dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

6. Laras Putri Olifiani, S.IP, M.H.I selaku dosen pembimbing akademik serta pembimbing utama yang selalu memberikan masukan dan semangat saya selama penyusunan dalam penelitian ini.
7. Posmanto Marbun, S.IP.,M.A., selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada saya selama pengerjaan penelitian ini.
8. Adibrata iriansyah, S.IP.,M.A., selaku Penguji II yang telah membantu dan berkenan mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan/Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman maka saya yakin masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi perbaikan yang lebih baik dari skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pontianak, 29 April 2026

Stefani Elika Adiel

E1112221027

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

ABSTRAK.....iv

***ABSTRACT*.....v**

RINGKASAN SKRIPSI.....vi

PERNYATAAN KEASLIAN.....ix

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....x

KATA PENGANTAR.....xi

DAFTAR ISI.....xiii

DAFTAR TABEL.....xvi

DAFTAR GAMBAR.....xvii

DAFTAR BAGAN.....xviii

DAFTAR LAMPIRAN.....xix

DAFTAR SINGKATAN.....xx

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah 15

1.3 Fokus Penelitian 16

1.4 Rumusan Masalah 16

1.5 Tujuan Penelitian.....17

1.6 Manfaat Penelitian.....17

1.6.1 Manfaat Teoritis 17

1.6.2 Manfaat Praktis 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
2.1 Teori *Structural Power* 20
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 25
2.3 Alur Pikir Penelitian 33
2.4 Pertanyaan Penelitian 34
BAB III METODE PENELITIAN 35
3.1 Jenis Penelitian 35
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 36
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 37
3.3.1 Lokasi Penelitian 37
3.3.2 Waktu Penelitian 39
3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 40
3.4.1 Unit Analisa 40
3.4.2 Unit Eksplanasi 40
3.4.3 Tingkat Analisa (*Level of analysis*) 40
3.5 Teknik Pengumpulan Data 41
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 44
3.7 Teknik Analisis Data 45
3.7.1 Keabsahan Data 45
3.7.2 Analisis Data 47
BAB IV GAMBARAN UMUM 50
4.1 Profil Tiongkok 50
4.1.1 Sejarah dan Sistem Pemerintahan Tiongkok 50
4.1.2 Kebijakan Luar Negeri Tiongkok 61

4.1.3 Kebangkitan Ekonomi Tiongkok 67
4.2 Profil Iran 71
4.2.1 Sistem Pemerintahan Iran..... 71
4.2.2 Kebijakan Luar Negeri Iran..... 77
4.2.3 Sanksi Internasional dan Ekonomi Iran 82
4.2 Profil BRICS 85
4.3.1 Profil dan Kelembagaan BRICS 85
4.3.2 Proses Ekspansi BRICS 89
4.3.3 Pengaruh Tiongkok Di BRICS..... 92
4.3.4 Pengaruh BRICS Di Iran..... 96
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....102
5.1 Upaya Hegemoni Tiongkok Melalui Ekspansi BRICS+ Di Iran Berdasarkan *Security Element* 102
5.2 Upaya Hegemoni Tiongkok Melalui Ekspansi BRICS+ Di Iran Berdasarkan *Production Element* 110
5.3 Upaya Hegemoni Tiongkok Melalui Ekspansi BRICS+ Di Iran Berdasarkan *Financial Element*.....119
5.4 Upaya Hegemoni Tiongkok Melalui Ekspansi BRICS+ Di Iran Berdasarkan *Knowledge Element* 128
BAB VI PENUTUP 137
6.1 Kesimpulan.....137
6.2 Saran.....139
6.3 Keterbatasan Penelitian 140
DAFTAR PUSTAKA.....141
LAMPIRAN.....150

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

2.1 Hasil Penelitian yang Relevan 30
3.1 Waktu Penelitian 39
3.2 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 41
5.1 Investasi dan Proyek Tiongkok di Iran 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1. 1 Data Nilai Ekspor Anggota BRICS (2021) 4
1. 2 Data Ekspor Minyak Iran Ke Tiongkok 11
4. 1 Bendera Republik Rakyat Tiongkok 51
4. 2 Peta Negara Republik Rakyat Tiongkok 52
4. 3 Kongres Nasional Tiongkok..... 59
4. 4 Peta Pesebaran Belt and Road Initiative (BRI) 64
4. 5 Ekspansi BRICS..... 91
4.6 Peta Iran..... 72
4.7 Bendera Iran 73
4. 8 Lambang IRGC 76
4. 9 Pesebaran Jaringan Poros Perlawanan Iran di Timur Tengah 79
5. 1 Peta Pesebaran Militer AS Di Timur Tengah 103
5. 2 Data Ekspor Tiongkok Ke Iran.....116
5. 3 Perbandingan PDB G7 vs BRICS Dalam *Purchasing Power Parity* (PPP)..125
5. 4 Pertemuan Presiden Xi Jinping Dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei Dalam Kunjungannya Ke Teheran..... 130

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1 Biodata Penulis……...……...150

2 Surat Tugas Penelitian……...151

DAFTAR SINGKATAN

5G	*Fifth Generation* (Generasi Kelima Teknologi Telekomunikasi)
AI	*Artificial Intelligence*
AIIB	*Asian Infrastructure Investment Bank*
AS	Amerika Serikat
BP	*British Petroleum*
BRI	*Belt and Road Initiative*
BRIC	Brazil, Russia, India, China
BRICS	Brazil, Russia, India, China, South Africa
CIA	*Central Intelligence Agency*
CIPS	*Cross-Border Interbank Payment System*
CRA	*Contingent Reserve Arrangement*
CSPA	*Comprehensive Strategic Partnership Agreement*
EIA	*Energy Information Administration*
EPI	Ekonomi Politik Internasional
FDI	*Foreign Direct Investment*
G7	*Group of Seven*
IAEA	*International Atomic Energy Agency*
IEA	*International Energy Agency*
IMF	*International Monetary Fund*
IRGC	*Islamic Revolutionary Guard Corps*
ISA	Iran *Sanctions Act*
JCPOA	*Joint Comprehensive Plan of Action*

KMT	Kuomintang (Partai Nasionalis Tiongkok)
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
MI6	*Military Intelligence, Section 6*
Mtoe	*Million Tonnes of Oil Equivalent*
NBS	*National Bureau of Statistics*
NDB	*New Development Bank*
NPC	*National People's Congress*
OECD	*Organization for Economic Co-operation and Development*
P5+1	*Permanent Five Plus One*
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PKT	Partai Komunis Tiongkok
PPP	*Purchasing Power Parity*
RMB	Renminbi
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
SWIFT	*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*
TFR	*Total Fertility Rate*
UNCLOS	*United Nations Convention on the Law of the Sea*
WTO	*World Trade Organization*
ZEK	Zona Ekonomi Khusus

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi Politik Internasional (EPI) mempelajari hubungan yang kompleks antara kekuatan ekonomi dan politik yang terjadi dalam sistem internasional. Ekonomi Politik Internasional berfokus pada bagaimana negara-negara dan aktor non-negara menggunakan kekuatan ekonomi untuk mencapai tujuan politik (Gilpin, 2001). Salah satu konsep utama dalam Ekonomi Politik Internasional adalah hegemoni, yaitu dominasi satu negara atau kelompok negara yang memiliki kekuatan untuk membentuk aturan dan norma dalam sistem internasional, baik melalui tindakan politik maupun ekonomi (Gilpin, 2001). Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat telah mengambil alih sistem internasional, membangun struktur berbasis *Bretton Woods,* termasuk *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan akhirnya *World Trade Organization* (WTO), dan menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan global (Keohane, 1984). Tiga pilar utama membentuk hegemoni Amerika Serikat yaitu kekuatan militer yang tak tertandingi melalui proyeksi kekuatan global, dominasi ekonomi melalui perusahaan multinasional dan kendali atas institusi keuangan internasional, dan *soft power* melalui penerapan nilai-nilai demokrasi liberal dan budaya populer Amerika.

Namun, sejak awal abad ke-21 ada kekuatan-kekuatan baru yang menantang hegemoni Barat, terutama AS, dan mengubah dinamika hegemoni dalam struktur internasional. Dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, terjadi pergeseran yang mengubah keseimbangan kekuatan global. Negara-negara yang

dulunya terbelakang dalam sistem internasional sekarang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang semakin besar, yang memungkinkan mereka untuk mengubah tatanan global sesuai dengan kepentingan mereka (Strange, 1987). Proses ini menghasilkan apa yang disebut sebagai era multipolaritas, di mana kekuatan global dibagi di antara berbagai pusat kekuatan yang bersaing untuk dominasi regional dan global. Dalam konteks ini, hegemoni tidak hanya dibangun melalui dominasi militer, seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada umumnya, tetapi juga dibangun melalui kontrol struktural atas teknologi, ekonomi, dan keuangan, yang mengakibatkan ketergantungan negara lain dan membatasi fleksibilitas kebijakan mereka (Strange, 1987, p. 565). Kemunculan dan ekspansi BRICS sebagai platform multilateral dengan tujuan untuk membentuk struktur internasional yang lebih representatif dan mengurangi dominasi organisasi yang didominasi Barat merupakan salah satu manifestasi paling signifikan dari tantangan terhadap hegemoni Barat.

BRICS, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, telah menjadi aliansi ekonomi global yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok ini telah berusaha memperluas pengaruhnya melalui inisiatif BRICS+. Ekspansi BRICS menjadi salah satu hal yang menarik perhatian di tahun 2021 yang kemudian di awal tahun 2024, kelompok BRICS menambahkan anggota baru (Council on Foreign Relations, 2024). Iran, bersama Uni Emirat Arab, Mesir, dan Etiopia, resmi bergabung membentuk BRICS+. Namun, Iran menempati posisi istimewa dalam strategi Tiongkok di antara keempat anggota baru, karena kombinasi unik dari isolasi internasional yang berkepanjangan, cadangan energi

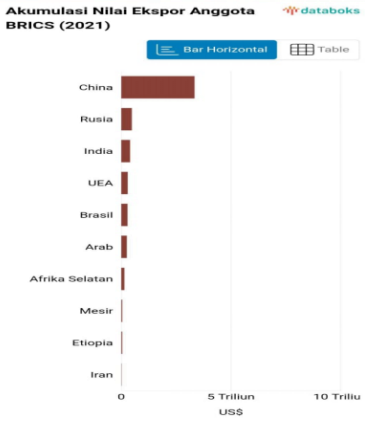
yang masif (gas alam terbesar kedua dan minyak terbesar keempat di dunia), serta posisi geografis strategis sebagai pintu gerbang ke Asia Tengah (Patrick & Hogan, 2025). Tiongkok, sebagai salah satu pendiri BRICS dengan ekonomi terbesar, tidak hanya berkontribusi pada ekspansi BRICS+, tetapi turut secara strategis memanfaatkannya sebagai instrumen untuk membangun hegemoni ekonomi dan diplomatik di Iran (Jütten & Falkenberg, 2024, p. 1-12).

Tiongkok telah menjadi anggota inti BRICS sejak awal berdirinya kelompok ini. Kehadiran Tiongkok dimulai ketika forum tingkat menteri luar negeri "BRIC," yang awalnya terdiri dari Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok, pertama kali diselenggarakan di New York pada tahun 2006 (Priangani, 2015. P. 35-39). Namun, peran Tiongkok dalam BRICS bukan sekadar sebagai anggota dengan ekonomi terbesar, melainkan sebagai kekuatan dominan yang secara strategis menggunakan platform BRICS+ untuk membangun pengaruh hegemonik di negara-negara anggota baru, khususnya Iran. Dengan ekonomi pasar berkembang terbesar di dunia, kapasitas ekonomi Tiongkok jauh melampaui anggota BRICS lainnya. Setelah KTT kepala negara pertama di Yekaterinburg pada 2009, posisi strategis Tiongkok dalam BRICS semakin menguat. Dengan kekuatan ekonomi, finansial, dan diplomasi yang superior, Tiongkok memanfaatkan BRICS+ sebagai instrumen untuk membangun dominasi, terutama di negara-negara yang terisolasi dari sistem Barat seperti Iran (Kamin & Langhammer, 2023, p. 259). Tiongkok menciptakan dan memelihara tatanan ekonomi-politik yang menguntungkan kepentingannya sendiri melalui institusi multilateral seperti BRICS+, sebuah strategi yang secara

langsung menantang dominasi Amerika Serikat yang telah lama mengakar di Timur Tengah.

Gambar 1. 1

Data Nilai Ekspor Anggota BRICS (2021)



Sumber: databoks, 2024.

Grafik diagram di atas menunjukkan total nilai ekspor negara-negara anggota BRICS pada tahun 2021, dengan fokus utama pada perbandingan kontribusi ekspor masing-masing negara terhadap total ekspor kelompok. Terlihat bahwa Tiongkok mendominasi dengan nilai ekspor mencapai 3,34 triliun USD yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara anggota lainnya (Santika, 2024). Iran, salah satu mitra dagang paling penting Tiongkok di dunia, terkena dampak langsung dari dominasi ekonomi Tiongkok. Dengan nilai ekspor Tiongkok yang mencapai 3,34 triliun USD pada 2021, menunjukkan kapasitas produksi global Tiongkok yang besar. Kapasitas ini menjadi salah satu dasar bagi dominasi ekonomi Tiongkok dalam BRICS+, yang kemudian dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membangun pengaruh struktural, terutama di Iran. Meskipun ekspor minyak Iran dilarang oleh AS dan dilakukan melalui jalur tidak resmi, Tiongkok mengimpor

sekitar 90% dari total ekspor Iran pada tahun 2023 (Atlantic Council, 2025; Bloomberg, 2024), ini menjadikan Iran sebagai salah satu penyedia minyak penting bagi Tiongkok dengan volume harian 1,2-1,5 juta barel (INSS, 2024).

Kelompok BRICS, mulai menginisiasi ekspansi keanggotaan sejak tahun 2021 (Malik dkk, 2024). Pada proses ini, Tiongkok memainkan peran penting sebagai pendorong utama ekspansi, terutama mendorong Iran untuk bergabung. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan mereka di tingkat global dengan menyertakan negara-negara baru yang memiliki potensi ekonomi dan geopolitik strategis. Para pemimpin negara anggota BRICS mengumumkan pada KTT BRICS 2021 bahwa mereka siap untuk menerima anggota tambahan, yang mana ini memulai proses menuju BRICS+ (Malik dkk., 2024, p. 77). Hal ini tentu juga menjadi peluang bagi Tiongkok untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Iran melalui penandatanganan *Strategic Partnership Agreement* pada Maret 2021 senilai $400 miliar, yang menandai integrasi Iran ke dalam BRICS+ tiga tahun kemudian (Tiezzi, 2021). Pada tahun 2022, negara-negara berkembang yang memiliki pengaruh regional yang signifikan akan menjadi subjek diskusi yang lebih intens sebagai kriteria keangotaan.

Pada KTT Johannesburg Agustus 2023, enam negara, yakni Argentina, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, diundang untuk bergabung dengan BRICS (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2023). Namun, hanya lima negara yang mengonfirmasi keanggotaan, karena Argentina menarik diri akibat masalah politik negaranya (Cohen, 2024). Pada Januari 2024, Iran menjadi salah satu dari empat negara yang resmi bergabung. Hal ini menandai transformasi BRICS

menjadi BRICS+. Perkembangan ini turut menandai keberhasilan strategi jangka panjang Tiongkok dalam mengintegrasikan Iran ke dalam sistem multilateral yang dipimpinnya, hal ini akan membantu memperkuat posisi Tiongkok sebagai mitra diplomatik dan ekonomi utama Iran (Jütten & Falkenberg, 2024, p. 5-6).

Upaya Tiongkok untuk menjadi hegemoni di Iran tidak terlepas dari persaingan dengan Amerika Serikat, yang telah mendominasi Timur Tengah selama bertahun-tahun melalui aliansi keamanan dan kontrol terhadap sistem keuangan global (Council on Foreign Relations, 2024). *Power projection* militer Tiongkok memang terbatas apabila dibandingkan dengan AS, yang memiliki basis militer permanen di kawasan dengan lebih dari 34.000 personel. Namun, keadaan geopolitik di Iran sangat berbeda, dan hal ini merupakan hal yang menguntungkan bagi Tiongkok.

Amerika Serikat telah menerapkan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Iran sejak Revolusi Islam 1979. Sanksi ini menjadi lebih ketat sejak AS meninggalkan kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) pada 8 Mei 2018, yang memutuskan akses Iran ke pasar global dan sistem finansial internasional (SWIFT) (Cirlig, 2025, p. 2). Menurut Council on Foreign Relations (2018), mata uang rial kehilangan lebih dari 70% nilainya, ekspor minyak Iran menurun drastis, dan Iran tidak dapat mengakses sekitar $100 miliar aset yang dibekukan di bank-bank asing. Isolasi berkepanjangan ini menciptakan kekosongan ekonomi dan diplomatik strategis yang menjadi peluang bagi Tiongkok untuk memperluas hegemoninya.

Di tengah sanksi AS yang semakin ketat, periode 2016-2020 merupakan fase krusial dalam penguatan hubungan antara BRICS, khususnya Tiongkok, dan Iran. Setelah kesepakatan JCPOA pada 2016, Tiongkok meningkatkan investasi di Iran, dengan dana dari *New Development Bank* BRICS untuk proyek infrastruktur. Pada 2021, gabungan PDB BRICS melampaui G7, menunjukkan kekuatan ekonomi BRICS, yang membantu Iran menemukan alternatif ekonomi saat terisolasi dari Barat. Pada kunjungan Presiden Xi Jinping ke Iran pada tahun 2016, terjadi perjanjian kerja sama strategis yang akan berlangsung lama, yang meningkatkan hubungan kedua negara dan mencakup investasi di bidang energi dan telekomunikasi. Namun, dinamika hubungan AS-Iran berubah setelah AS keluar dari JCPOA dan menerapkan sanksi berat pada 2018, yang mengurangi perdagangan resmi antara kedua negara secara signifikan. Ini terjadi meskipun Tiongkok terus mengimpor minyak Iran secara ilegal. Dalam situasi ini, Iran menjadi sangat bergantung pada Tiongkok sebagai mitra utama, terutama dalam bidang energi, yang menghasilkan ketergantungan struktural yang memberikan Tiongkok pengaruh besar. Kerja sama pertahanan antara keduanya juga meningkat, dan rencana investasi Tiongkok senilai $400 miliar di Iran menunjukkan keinginan Tiongkok untuk mempertahankan dominasi dalam hubungannya dengan Iran.

Berdasarkan pada Atlantic Council (2025), Tiongkok adalah satu-satunya pilihan ekonomi Iran ketika mereka benar-benar terisolasi dari Barat. Tiongkok adalah salah satu negara yang berani melanggar sanksi AS untuk terus membeli minyak Iran, menjadikan Tiongkok pasar utama, bahkan satu-satunya pasar signifikan bagi ekspor energi Iran (Fadlon & Zimmt, 2024). Ketergantungan

struktural inilah yang menciptakan hegemoni Tiongkok di Iran. Hegemoni ini dibangun bukan melalui kekuatan militer, tetapi melalui *leverage* ekonomi yang kuat dan diplomasi yang menawarkan opsi alternatif untuk mengatasi tekanan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan BRICS+ bergantung pada strategi yang berbeda yang digunakan Tiongkok, yaitu memanfaatkan kekuatan produksi dan finansial untuk mengimbangi keterbatasan *power projection* militer di Timur Tengah khususnya Iran.

Pada 27 Maret 2021, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menandatangani *Comprehensive Strategic Partnership Agreement*, yang merupakan fondasi konkret dari upaya hegemoni Tiongkok terhadap Iran (Tiezzi, 2021). Penandatanganan ini dilakukan dalam rangka perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara, namun makna strategisnya jauh melampaui simbolisme diplomatik. Berdasarkan dokumen *draft* sebanyak 18 halaman yang bocor kepada media internasional, menunjukkan cakupan dan luasnya perjanjian yang sangat besar. Ini terjadi meskipun pemerintah kedua negara tidak mengungkapkan secara detail lengkap perjanjian tersebut, bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menolak mengonfirmasi jumlah investasi tertentu dalam perjanjian tersebut (Rasanah-IIIS, 2021).

Berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh The New York Times menunjukkan komitmen Tiongkok untuk menginvestasikan hingga $400 miliar dalam ekonomi Iran selama 25 tahun sebagai imbalan atas pasokan minyak Iran yang stabil dengan harga diskon yang signifikan. Menurut analisis yang

dipublikasikan oleh Petroleum Economist dan dikonfirmasi oleh International Institute for Iranian Studies, investasi besar ini akan mencakup $280 miliar untuk industri gas, minyak, dan petrokimia, dan $120 miliar lainnya akan dialokasikan untuk modernisasi infrastruktur manufaktur dan transportasi (Rasanah-IIIS, 2021). Selain itu, lebih dari 100 proyek potensial tercakup dalam perjanjian ini. Ini termasuk sistem kereta bawah tanah, pembangunan bandara, modernisasi jaringan kereta api nasional, investasi dalam fasilitas produksi dan pemurnian gas dan minyak, pengembangan pelabuhan Chabahar di Laut Oman, dan dukungan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi 5G dengan teknologi Huawei (Reynolds, 2021). Secara lebih strategis, perjanjian ini juga mencakup peningkatan kerja sama pertahanan dan keamanan, seperti memberikan akses kepada Tiongkok ke fasilitas pelabuhan strategis Iran di Laut Oman dan kemungkinan penempatan tentara Tiongkok di Iran (Green & Roth, 2021).

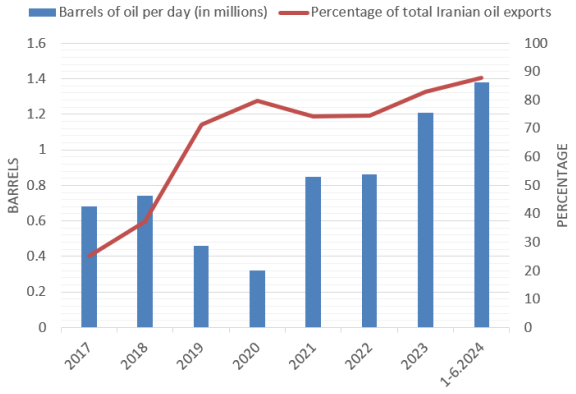
Dalam konteks ekonomi Iran dan hubungan Tiongkok-Iran, investasi $400 miliar selama dua puluh lima tahun ini sangat penting. Berdasarkan pada laporan yang dipublikasikan oleh China US Focus, angka ini telah meningkat delapan kali lipat dari total investasi kumulatif Tiongkok di Iran selama dekade 2010-2020 yang hanya mencapai sekitar $27 miliar (Reynolds, 2021). Sebagai perbandingan, dalam kurun waktu yang sama, Tiongkok menginvestasikan sekitar $30 miliar di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masing-masing. Ini menunjukkan bahwa komitmen $400 miliar kepada Iran merupakan lonjakan investasi yang sangat tidak proporsional dan jelas didorong oleh kepentingan strategis, bukan hanya pada kalkulasi ekonomi (Reynolds, 2021). Investasi sebesar $400 miliar selama 25 tahun

setara dengan $16 miliar setiap tahun, atau sekitar 3,5% dari PDB Iran saat ini. Ini adalah suntikan modal asing yang signifikan mengingat arus masuk investasi asing langsung (FDI) Iran saat ini hanya sekitar 0,5% dari PDB karena sanksi internasional (Reynolds, 2021).

Presiden Xi Jinping pertama kali menyarankan perjanjian ini saat ia berkunjung ke Tehran pada Januari 2016, di mana ia bertemu langsung dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun, pada Maret 2021, penjanjian ini baru ditandatangani setelah situasi Iran semakin memburuk sebagai akibat dari penarikan AS dari JCPOA pada 2018 dan intensifikasi sanksi "tekanan maksimum" yang diterapkan oleh pemerintahan Trump (CCMEAS, 2021). Penandatanganan perjanjian ini sangat dinilai strategis karena dilakukan hanya beberapa minggu sebelum pembicaraan tidak langsung antara Iran dan AS di Wina tentang kemungkinan AS kembali ke JCPOA, yang menunjukkan bahwa Iran dan Tiongkok menggunakannya sebagai *leverage* diplomatis dalam menekan Amerika Serikat dan memperkuat posisi negosiasi Iran (Falk, 2021). *Comprehensive Strategic Partnership Agreement* tidak hanya sekadar dokumen ekonomi, melainkan juga alat geopolitik yang membentuk ketergantungan jangka panjang dengan Tiongkok. Iran bergantung pada Tiongkok sebagai pasar utama untuk 90% ekspor minyaknya dan sebagai satu-satunya sumber investasi asing penting di tengah sanksi yang menghambat akses Iran ke modal Barat. Dengan demikian, Iran tidak memiliki pilihan selain menerima dominasi ekonomi Tiongkok untuk dapat tetap tetap bertahan (Atlantic Council, 2025).

Gambar 1. 2

Data Ekspor Minyak Iran Ke Tiongkok



Sumber : Statista, United Against Nuclear Iran, 2024.

Data diatas menunjukkan bahwa Tiongkok mengimpor minyak Iran sekitar 1.2-1.38 juta barel per hari pada tahun 2023, meningkat menjadi 1.74 juta barel per hari pada tahun 2024 karena tekanan sanksi baru (INSS, 2024). Tiongkok telah menjadi pembeli minyak Iran terbesar pada tahun 2023 dan 2024, dengan mengimpor sekitar 90-91% dari total ekspor minyak Iran (INSS, 2024). Selain minyak, Iran juga sangat bergantung pada Tiongkok untuk impor barang manufaktur, teknologi, dan investasi infrastruktur. Pada tahun 2023, perdagangan kedua negara akan mencapai lebih dari $14 miliar (INSS, 2024). Tiongkok memiliki kendali struktural atas ekonomi Iran oleh karena ketergantungan ekonominya yang besar. Ini menjadikan hubungan ini sebagai contoh klasik hegemoni ekonomi di mana Tiongkok memiliki kendali struktural atas ekonomi Iran. Iran melihat keanggotaan BRICS sebagai kesempatan untuk memperkuat kemandirian ekonomi mereka dan menurunkan ketergantungannya pada sistem keuangan Barat. Akan tetapi, ironisnya, keanggotaan ini justru meningkatkan ketergantungan Iran pada Tiongkok.

Iran sangat bergantung pada pasar Tiongkok karena selain dari sektor energi, Iran juga melakukan impor produk manufaktur, investasi infrastruktur, teknologi, dan energi. Pada tahun 2023, Tiongkok mengekspor sekitar $10 miliar barang ke Iran, sementara Iran mengekspor sekitar $4,59 miliar ke Tiongkok. berdasarkan hal tersebut, Tiongkok dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran sesuai kepentingannya karena posisi ekonominya yang dominan terhadap Iran (INSS, 2024).

Tiongkok menggunakan strategi alternatif yang berpusat pada instrumen ekonomi dan diplomasi untuk mengatasi keterbatasan militernya dengan berfokus pada Iran sebagai target utama hegemoni di Timur Tengah. Penandatanganan *Strategic Partnership Agreement* pada Maret 2021, yang mencakup investasi senilai $400 miliar selama 25 tahun (Tiezzi, 2021), kerja sama di bidang energi, dengan komitmen untuk membeli minyak dan gas dalam jangka waktu panjang, infrastruktur melalui pengembangan pelabuhan Chabahar, modernisasi jaringan kereta api Trans-Iran, pembangunan jalan raya, transportasi, telekomunikasi, dan pertahanan serta intelijen, dengan penerapan jaringan 5G Huawei. Perjanjian ini menciptakan ketergantungan struktural Iran terhadap Tiongkok untuk 25 tahun ke depan, sebuah keterikatan yang jauh melampaui hubungan perdagangan biasa dan lebih menyerupai hubungan *patron-client* dalam konteks hegemoni (CCMEAS, 2021).

Selain melalui ekspansi ekonomi dan investasi infrastruktur, Tiongkok juga mulai menunjukkan perannya sebagai mediator dalam konflik Timur Tengah, terutama melalui pendekatan diplomasi damai dan non-intervensi. Hal ini terlihat

melalui keberhasilan mediasi Tiongkok dalam perjanjian rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran pada Maret 2023, yang menandai berakhirnya ketegangan diplomatik selama tujuh tahun. Kesepakatan ini ditandatangani di Beijing dan dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya menstabilkan kawasan yang selama ini dilanda rivalitas Sunni-Syiah. Keberhasilan tersebut memperkuat citra Tiongkok bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), tetapi juga sebagai aktor politik global yang mampu memfasilitasi dialog di antara kekuatan regional utama (Jin, 2024).

Keterlibatan Tiongkok dalam BRICS tidak hanya memperkuat kelompok dari segi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai platform multilateral yang melegitimasi dominasi bilateral Tiongkok terhadap Iran (Santika, 2024). Tiongkok telah mengintegrasikan Iran ke dalam jaringan infrastruktur dan ekonomi regional melalui Inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI), yang membuat Iran semakin bergantung pada sistem yang dibuat dan dikendalikan oleh Tiongkok (Mogielnicki, 2024). Dari 2021 hingga 2024, Tiongkok secara sistematis mendorong pertumbuhan dan keterlibatan Iran dalam BRICS+ dengan menggunakan BRI, kolaborasi strategis, dan diplomasi, menciptakan jaring ketergantungan ekonomi yang mendalam. Ekspansi BRICS+ periode 2021-2024 dengan Iran sebagai anggota baru adalah puncak dari strategi hegemoni Tiongkok yang terkalkulasi dan sistematis.

Mengingat bahwa Timur Tengah merupakan pusat energi dunia dan arena persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan banyak negara lain, langkah untuk ekspansi ke wilayah ini merupakan langkah strategis yang menarik perhatian

dunia. Dengan cadangan gas alam terbesar kedua dan minyak terbesar keempat di dunia, menjadikan Iran sebagai target utama dalam rencana hegemoni Tiongkok. Iran juga memandang keanggotaan BRICS+ sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari isolasi selama lebih dari empat puluh tahun sanksi AS. Sebaliknya, negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Mesir tetap memiliki hubungan dengan AS dan melihat BRICS+ sebagai diversifikasi mitra strategis (Mogielnicki, 2024). Dalam situasi tersebut Iran tidak memiliki posisi tawar yang kuat, menjadi anggota BRICS+ bukanlah pilihan strategis, tetapi keharusan untuk bertahan secara ekonomi.

Penelitian ini sangat penting karena upaya hegemoni Tiongkok di Iran melalui ekspansi BRICS+ dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan seluruh sistem internasional. Setelah lebih dari empat puluh tahun terisolasi dari sistem Barat, Iran sekarang menjadi kunci bagi Tiongkok untuk membangun struktur alternatif yang menantang dominasi Amerika Serikat di wilayah strategis ini. Hegemoni Tiongkok di Iran bukan hanya kerjasama bilateral, melainkan merupakan bagian dari rencana geopolitik yang lebih besar untuk membangun dunia multipolar di mana Tiongkok akan menggantikan atau setidaknya menyaingi AS sebagai kekuatan dominan di beberapa wilayah strategis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami mekanisme hegemoni Tiongkok di Iran melalui BRICS+. Ini dilakukan melalui penggunaan ekspansi BRICS+ sebagai alat untuk membangun ketergantungan ekonomi, membentuk preferensi kebijakan, dan melegitimasi dominasi bilateral (Mogielnicki, 2024).

Namun, kekurangan penelitian saat ini adalah kurangnya analisis empiris spesifik tentang bagaimana Tiongkok membangun dan mempertahankan pengaruh hegemoninya di Iran di tengah persaingan dengan Rusia, tantangan domestik Iran, dan risiko sanksi AS. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek ekonomi umum BRICS atau hubungan bilateral Tiongkok-Iran secara terpisah, tanpa mengintegrasikan keduanya dalam kerangka analisis hegemoni yang kritis terhadap dinamika kekuasaan dan ketergantungan struktural. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menganalisis upaya hegemoni Tiongkok di Iran secara komprehensif melalui kerangka ekspansi BRICS+ periode 2021-2024, menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi geopolitik, ekonomi, dan diplomasi untuk dapat menjelaskan bagaimana Tiongkok memanfaatkan institusi multilateral seperti BRICS+ untuk membangun dan memelihara dominasi ekonomi dan diplomatik terhadap negara yang bergantung seperti Iran.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan *power projection* militer Tiongkok di tengah dominasi keamanan AS di Timur Tengah, menciptakan kerentanan bagi upaya hegemoni Tiongkok di Iran.
2. Ketergantungan struktural ekonomi Iran terhadap Tiongkok menciptakan ketidakseimbangan yang dapat mengurangi kedaulatan ekonomi dan kebijakan luar negeri Iran.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian "Upaya Hegemoni Tiongkok Melalui Ekspansi BRICS+ Di Iran Tahun 2021-2024", akan berfokus pada bagaimana Tiongkok memanfaatkan kekuatan strukturalnya untuk membentuk serta mengontrol aturan dan institusi dalam ekspansi BRICS+ sebagai instrumen strategis dan ekonomi untuk mempengaruhi Iran. Penelitian akan menekankan penguasaan Tiongkok atas struktur ekonomi, keuangan, teknologi, dan keamanan, yang memungkinkan Tiongkok mengarahkan preferensi kebijakannya terhadap Iran serta menciptakan ketergantungan melalui mekanisme struktural, bukannya hanya sekedar hubungan hegemoni konvensional. Selain itu, penelitian ini akan difokuskan dengan batasan tahun 2021-2024. Di tahun 2021, menandai penandatanganan *Comprehensive Strategic Partnership Agreement* senilai $400 miliar yang membentuk fondasi hubungan hegemoni kedua negara dan di tahun 2024, yang menandai keanggotaan resmi Iran dalam BRICS+. Hal ini juga turut menegaskan posisi Tiongkok sebagai pengendali struktural dalam hubungan multilateral. Oleh karena itu, daripada berfokus pada dominasi hegemoni secara langsung, analisis akan lebih berfokus pada mekanisme pengaruh struktural yang sistematis dan institusional.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan sebagai berikut “Bagaimana Upaya hegemoni Tiongkok melalui ekspansi BRICS+ di Iran Tahun 2021-2024?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan Tiongkok melalui ekspansi BRICS+ dalam membangun hegemoninya di Iran.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hubungan internasional, khususnya dalam pengembangan Teori *Structural Power*, dengan menyoroti bagaimana kekuatan hegemonik seperti Tiongkok menggunakan kontrol atas empat elemen struktural yaitu *security element, production element, financial element, dan knowledge element*, melalui institusi multilateral seperti BRICS+ untuk membangun dan mempertahankan dominasi ekonomi dan diplomatik mereka terhadap negara-negara yang bergantung, seperti Iran.. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika kekuasaan asimetris dalam hubungan bilateral dan mengungkap bagaimana hubungan *patron-client* terbentuk dalam konteks institusi multilateral yang tampak setara. Selain itu, penelitian ini, melalui studi kasus Iran, memberikan perspektif baru tentang perkembangan Teori *Structural Power*. Teori ini berbicara tentang bagaimana kekuatan hegemonik yang tengah bangkit, seperti Tiongkok (*rising power*), dapat memanfaatkan isolasi internasional suatu negara yang disebabkan oleh sanksi hegemonik dominan seperti Amerika Serikat sebagai celah struktural untuk membangun pengaruhnya,

tanpa harus melakukan konfrontasi militer langsung dengan hegemon tersebut.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan ilmiah untuk memperluas penelitian mengenai strategi hegemoni alternatif di era multipolar. khususnya mengenai bagaimana negara-negara yang sedang berkembang seperti Tiongkok menggunakan instrumen ekonomi dan institusi multilateral untuk membangun dominasi tanpa menggunakan kekuatan militer. Diharapkan penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang mekanisme ketergantungan struktural dan bagaimana institusi multilateral dapat digunakan sebagai alat hegemoni. Serta diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah dalam memahami pergeseran struktur kekuasaan global dan dinamika hubungan asimetris antara negara berkembang.

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan wawasan dan kemampuan analisis terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi global, serta penerapan teori *structural power* dalam konteks aktual hubungan internasional. Kemudian bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi referensi ilmiah dalam memahami hubungan antara kekuatan ekonomi, diplomasi, dan

politik global, serta mendorong kajian lebih lanjut mengenai peran negara berkembang dalam sistem multipolar dunia.